

Kongres PDI-P dan Kekuasaan

Oleh DANIEL DHAKIDAE

Kongres "partai tua"—partai-partai yang didirikan pada masa Orde Baru—berakhir dalam keributan besar yang sungguh tragis. Tidak ada keributan lebih besar dalam suatu partai daripada ketika salah satu unsur atau lebih menolak mengakui ketua umum terpilih dalam suatu kongres dan menghancurkan legitimasinya.

Menolak mengakui hasil puncak suatu kongres partai tidak lain dari menolak *raison d'être* partai itu. Sangat menarik bahwa kecelakaan ini menyangkut partai-partai tua yang dengan pengalaman berdasawarsa seharusnya menunjukkan kestabilan, kematangan, dan pengalaman *savoir faire* dalam suatu politik kepartaian.

Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat menjelang kongres adalah partai yang sangat berhasil mempertahankan tradisi tua kepartaian nasional dalam arti suatu "partai total", dalam pengertian suatu partai yang siap di dalam dirinya menjalankan suatu metode kerja dan perlengkapan kelembagaan dalam rangka *mini state*. Kongres PPP yang diwarnai skandal besar yang melibatkan calon/ketua umum partainya dengan sendirinya menjadi ramalan seperti apa nanti kongres yang dijalankan. Hasilnya membuktikan itu ketika terjadi perpecahan partai yang sulit didamaikan.

Kedua, Golkar menyelenggarakan kongres setelah mengalami frustrasi politik besar-besaran dalam Pemilihan Umum 2014 dalam dua dimensi penting. Sebagai pemenang nomor dua, Golkar sama sekali tidak mampu mencalonkan salah seorang anggotanya, termasuk ketua umumnya sendiri, untuk bertarung sebagai calon presiden. Ini untuk pertama kalinya sejak sistem politik bangsa ini masuk ke dalam sistem persaingan, termasuk persaingan "semu" sepanjang masa Orde Baru.

Dimensi penting lainnya adalah ketika Golkar sendiri tidak mampu juga menjadi pemimpin koalisi, *coalition leader*, dalam usaha peningkatan posisi partai dalam suatu persaingan menuju posisi tertinggi negara. Pemimpin koalisi mungkin tidak penting dalam dirinya, tetapi ia penting sebagai dasar pengakuan dalam kontestasi bebas di kalangan partai. Akibat dari dua hal di atas partai tersebut limbung sampai hari ini.

Politik menuju kongres PDI-P Bali

Sebenarnya, 9 April, akan ada kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bali, "partai tua" ketiga yang dalam urutan di atas menjalankan kongres. PDI-P berbeda dalam arti ia tidak mengalami frustrasi seperti Golkar karena menjadi pemenang pemilihan umum—meski kemenangan tersebut tidak menjadi cukup alasan untuk menikmati euforia bermewah-mewah seperti ditunjukkan pada masa penyusunan kabinet dan sesudahnya.

Kemampuan mengusung calon presi-

den dan memenangkan pemilihan kepresidenan menjadi alasan lain untuk membedakan dirinya dari dua partai tua di atas. Namun, kemenangan pemilihan kepresidenan pun tidak memberikan alasan untuk merayakan euforia bermewah-mewah. Dua kemenangan berlangsung tanpa euforia karena ketiadaan *political euphoria*, yaitu hal-hal yang memungkinkan euforia politik tersebut.

Euforik pada pemilihan umum baru ditemukan kalau kemenangan mayoritas bisa dicat. Dalam empat kali pemilu nasional setelah kejatuhan Orde Baru, tidak pernah suatu partai pun mencapai mayoritas mutlak. Karena itu, meski memenangkan Pemilihan Umum 014, PDI-P dengan susah payah mencari dan membentuk koalisi efektif meskipun Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tanpa ragu-ragu menjadi peserta pertama dan utama. Dengan latar belakang seperti itulah PDI-P akan menjalankan kongres di Bali.

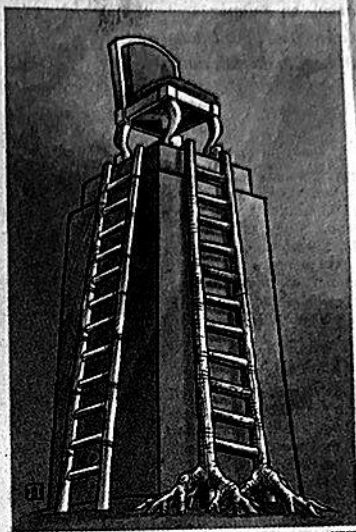
Meski demikian, kongres Bali 2015 berlangsung dalam suasana kemenangan. Di sisi lain, kemenangan tanpa euforia diam-diam mengangkat soal-soal politik yang berada di balik semuanya, seperti soal kepresidenan—sejauh mana seorang presiden dari suatu partai, PDI-P, menjadi "utusan" dan "petugas" partai; kapan kesetiaan kepada partai berhenti dan kesetiaan kepada bangsa dimulai. Soal pencalonan Kepala Polri yang didukung penuh oleh partai dan ujungnya adalah suatu fasko: calon partai, menjadi calon tunggal presiden, diterima pleno DPR, kemudian ditolak oleh Presiden sendiri sebagai pengusung calon tunggal. Tidak pernah terjadi kontradiksi politik kepresidenan sebesar itu dalam kepresidenan siapa pun pada masa lalu.

Semuanya dibuat serakit politik, yaitu seolah-olah menjadi "teka-teki" apakah pencalonan tunggal adalah servis atau jerat, *trick or treat*? Kalau itu berarti *trick*, semestinya persetujuan parlemen diterima dengan "senyum simpul" Presiden. Alternatifnya itu adalah *trick* sehingga diterima dengan penolakan getir dengan konsekuensi politik panjang berbelit-belit. Semuanya mengandung konsekuensi kepartaian sehingga kemenangan tanpa euforia di depan publik memberi kesan hubungan Presiden sebagai "petugas" partai semacam luntur. Akibatnya, partai pendukung berubah menjadi "semi-oposisi" dalam tindak politik parlementer.

Kontradiksi demi kontradiksi berlangsung tumpang-tumuk tanpa pemecahan, sekurang-kurangnya sampai tulisan ini dibuat.

Kongres PDI-P dan ketua umum partai

Pemilihan ketua umum adalah *pet agenda* dalam setiap kongres kepartaian nasional, agenda induk dan agenda timangan. Tanpa itu, setiap kongres menjadi cair, hambur, atau sebaliknya penuh ketegangan, kisuhan, dan kacau dari ujung ke ujung. Karena itu, pemilihan ketua umum adalah acara yang dinanti-nantikan oleh anggota partai sendiri dan ditunggu-tung-



bukan hanya bisa diolah dan dikerjakan, melainkan juga yang ketika diolah akan menghasilkan dasar-dasar baru yang kuat bagi kepentingan kekuasaan politik (*il principe*).

Dalam hubungan itu, kebenaran efektif dalam kehidupan kepartaian adalah menampilkan tokoh dan ketokohan yang terutama menjadi hitungan; baru sesudah itu muncul modal dan ideologi. Ketika bisa berbicara tentang ketua partai, kita berbicara tentang ketokohan, pengusung partai, dan bukan yang lain.

Ada tiga hal dasar, katanya, yang memungkinkan seorang penguasa berkuasa. Ini seolah-olah menjadi triad Machiavellian, yaitu *fortuna*, *virtu*, dan *necessita*. *Fortuna* lebih berurusan dengan surat takdir, garis tangan, sesuatu yang diatur dan langit, karena itu tidak bisa dikontrol manusia, liar tak terbandung—unsur irasional dalam memperoleh kekuasaan.

Virtu, bukan kebajikan dalam pengertian klasik kristen, berarti pengetahuan, pengorganisasian, rencana, strategi, siasat, dan lain-lain untuk mengatasi suatu keadaan demi mencapai kekuasaan—unsur rasional dalam kekuasaan.

Necessita, keniscayaan sejarah, yang didukung penuh oleh *fortuna* dengan sendirinya melancarkan jalan ke arah kekuasaan dan menjadi penguasa. *Fortuna* tanpa *virtu* membuat kekuasaan tidak langgeng, demikian juga sebaliknya, *virtu* tanpa *fortuna* suatu kekuasaan itu kering dan akan merangas dengan sendirinya. *Fortuna*, *virtu*, tanpa *necessita* hanya membuat suatu kekuasaan tidak terwujud. Dengan kata lain, tiga-tiganya menjadi unsur konstitutif kekuasaan yang langgeng.

Dalam hubungan dengan kongres PDI-P hampir tidak ada berita tentang calon ketua umum yang bocor ke publik, selain konsensus bahwa Megawati Soekarnoputri sudah ditawarkan menjadi ketua umum dalam rakernas PDI-P terakhir. Hal satu yang bocor ke media sosial adalah bahwa Joko Widodo akan menjadi pesaing keras Megawati Soekarnoputri dengan dukungan sejumlah pemodal.

Tentang Jokowi bisa dikatakan bahwa mungkin ada *fortuna* yang mendukungnya. Namun, akan berlangsung tanpa *virtu* karena dukungan internal partai tidak pernah dirancang dan dikerjakan—sekarang-kalangnya berdasarkan informasi publik dalam arti itu, kalau benar dia memasuki arena persaingan, hanya keniscayaan sejarah mungkin satu-satunya yang akan menjadi taruhannya.

Fortuna dan *virtu* berada di sisi Megawati Soekarnoputri dan sambil melihat perpecahan demi perpecahan di kalangan "partai tua" yang menakutkan, sangat besar kemungkinan *necessita*, keniscayaan sejarah—sebagaimana pernah berlangsung pada kongres Surabaya yang dramatis pada 1983—berada lagi di pundaknya.

DANIEL DHAKIDAE
Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Jurnal "Prisma"

gu publik pada umumnya.

Partai dalam tradisi bangsa ini selalu berambisi menjadi suatu *mini-state*, baik dalam kekuasaan sesungguhnya maupun dalam kelakuan sehari-hari para anggota terhadap ketua partainya masing-masing dan kelakuan para ketuanya sendiri. Dalam hubungan itu, ketua partai besar pada dasarnya menjadi kepala suatu *mini-state*. Karena itu, pemilihan ketua partai, terutama partai-partai besar, hanya bisa dibandingkan dengan pemilihan ketua partai di negeri-negeri sosialis dalam arti *Feierlichkeit*, suasana kegembiraan perayaan, yang diawali oleh ketegangan dan sikut-menyikut dalam persaingan.

Untuk kepentingan itu mari kita berguru kepada Niccolò Machiavelli, 1469-1527, seorang pendasar politologi, ilmu politik, sesungguhnya, yang melepaskan dirinya dari agama dan studi-studi agama, teologi, sebagai dasar analisis politik. Dalam hubungan dengan kekuasaan, Machiavelli mengatakan bahwa sudah banyak yang memberi nasihat macam-macam, tetapi dia tidak akan mengikuti pendapat-pendapat itu: "Rasanya lebih bijaksana bagi saya mengikuti the real truth of the matter rather than what we imagine it to be."

Ada dua hal di sini yang mau dikatakannya yang dibahas penulis dalam urutan terbalik. Pertama, adalah *what we imagine to be*, apa yang kita bayangkan, apa yang kita cita-citakan yang boleh jadi sesuatu yang sangat ideal, akan tetapi tidak bisa dikerjakan. Kenyataan dalam kehidupan politik kepartaian sesungguhnya yang ideal seperti ideologi bertempat dalam urutan terakhir dari hal-hal penting kepartaian.

Kedua, kenyataan utama yang sebenarnya adalah dalam bahasa Italia disebut *verita effettuale della cosa* yang lebih tepat diterjemahkan sebagai *the effective truth*, yaitu kebenaran efektif—kebenaran yang